<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak>

ISSN: 2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453

ARTICLE INFORMATION

Received September 9th 2019

Accepted November 11th 2019

Published January 24th 2020

DOI:

10.32639/jiak.v9i1.341

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita

Astiwi Indriani¹, Shoimatul Fitria²

^{1,2)} Universitas Diponegoro

email: astiwiindriani@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai penerapan penilaian tingkat kesehatan perbankan kemudian diadopsi untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Wanita di Jawa Tengah.. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi jasa keuangan di Jawa tengah tahun 2012-2014. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel 5 KJKS Wanita. Data diperoleh melalui data sekunder berupa laporan RAT dan laporan tahunan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki peringkat komposit 3 (PK-3) yang berarti masing-masing KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki kondisi cukup sehat dan cukup mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Kata Kunci: KJKS, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital

ABSTRACT

This study is an application of the assessment of banking health level then adopted to measure the health level of Islamic financial services cooperatives (KJKS) for women in Central Java. The population in this study is all financial service cooperatives in Central Java in 2012-2014. The sampling technique used was purposive sampling with a sample of 5 KJKS for women. Data obtained through secondary data in the form of RAT reports and annual reports. The analysis technique used is descriptive analysis. The results of the analysis showed that the KJKS for Women in Central Java had a composite rating of 3 (PK-3), which means that each KJKS for Women in Central Java was healthy enough and able to deal with the negative effects of changes in business conditions and other external factors.

Keywords: KJKS, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia sejak Indonesia merdeka. Koperasi pertama kali digalakan di Indonesia oleh wakil Presiden Indonesia yang pertama yaitu Muhamad Hatta. Sampai saat ini koperasi masih berada di bawah naungan Departemen Koperasi dan UMKM. Koperasi Jasa Keuangan merupakan salah satu dari lembaga Keuangan di Indonesia yang juga akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012 sudah mulai dikeluarkan isu bahwa koperasi seharusnya di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga OJK dapat mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan kebijakan *microprudentialnya* dalam membangun perekonomian Indonesia. Hal ini penting bagi koperasi, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dapat meningkatkan peran dan kinerja dari koperasi. Koperasi dapat meningkatkan kinerjanya yaitu dengan mengoptimalkan perannya sebagai *intermediary institution* yaitu dengan menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana sehingga dengan peran ini masyarakat yang membutuhkan dana dapat menggunakan dana tersebut guna mencukupi kebutuhan hidupnya maupun untuk pengembangan usaha.

Tingkat kesehatan lembaga keuangan bank dan non bank menjadi sarana bagi otoritas pengawas dalam rangka menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap institusi lembaga keuangan dibawahnya, oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan bank dan non bank dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko baik itu dari koperasi maupun unit usaha lembaga keuangan bank dan non bank. Maka Bank Indonesia menetapkan peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum melalui peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dimana peraturan ini menggantikan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, oleh karena itu setiap perbankan diwajibkan melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap tingkat kesehatan perbankan menggunakan peraturan terbaru dan peraturan yang lama sudah tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember 2011. Proses penilaian tingkat kesehatan ini tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pihak manajemen perbankan guna memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bank dapat menunjukkan kepada Bank Indonesia dan *stake holders* bahwa bank dalam kondisi sehat. Tetapi sayangnya peraturan ini belum menyentuh pada lembaga keuangan Koperasi di Indonesia.

Jumlah Koperasi di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai 209.488 dengan Koperasi yang aktif sejumlah 147.249 unit koperasi (www.depkop.co.id). Dari jumlah koperasi yang aktif, terdaftar jumlah anggota sebanyak 36.443.953 orang. Hal ini menjadi penting untuk dijadikan salah satu faktor lembaga pengawasan institusi keuangan di Indonesia, dikarenakan 15 % jumlah penduduk di Indonesia adalah anggota Koperasi. Sedangkan selama tahun 2012 sampai 2014, masyarakat Indonesia beberapa kali dirugikan lembaga keuangan yang mengatasnamakan Koperasi. Sebut saja koperasi, IQRA, Cipaganti, Langit Biru yang letaknya di Jawa Tengah. Selain itu ada juga koperasi. Koperasi Danan Jaya di Kabupaten Bangli dan Koperasi Wisnu yang berlokasi di Kabupaten Gianyar. Permasalahan dari koperasi tersebut adalah utang piutang yang bermasalah ataupun dana yang dilarikan oleh pemiliknya.

Sistem pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam (syariah) tentunya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, bank umum baik itu bank umum konvensional dan bank umum syariah wajib melakukan penilaian sendiri (*self Assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Dimana penilaian sendiri dilakukan paling kurang setiap semester pada akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian secara individual dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) yang cakupan penilaiannya sesuai dengan faktor-faktor : profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan *Capital*.

Dalam penelitian ini, dipergunakan peraturan dari bank Indonesia dalam menilai kesehatan bank untuk diterapkan guna menilai tingkat kesehatan Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank. Penilaian terhadap faktor profil risiko ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 42strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian terhadap faktor-faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen koperasi atas pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG. Sedangkan penilaian terhadap 43 faktor rentabilitas (*earnings*) merupakan penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings* dan *sustainability earnings* koperasi. Dari ketiga 43 faktor tersebut telah ditetapkan peringkat berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 43 faktor, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita menjadi objek dalam penelitian ini karena KJKS Wanita menjadi salah satu institusi yang memiliki program pemberdayaan wanita dengan melakukan perekrutan pengurus koperasi khusus dari gender wanita dengan tingkat pendidikan mulai dari SMU sampai dengan sarjana. KJKS Wanita aktif beroperasi di sepuluh kota di Jawa Tengah. Keunikan pengurus dari gender wanita tidak menutup kemungkinan bahwa anggota koperasi KJKS juga menerima dari semua kalangan termasuk kalangan pria. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin mengetahui tingkat kesehatan KJKS wanita di Jawa Tengah periode tahun 2012-2014 dengan menggunakan pendekatan *risk-based bank*.

KAJIAN LITERATUR

Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 43 faktor, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (UU No 17 Tahun 2012). Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan faktor usahanya yaitu: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Tujuan pengembangan KJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah antara lain : Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui faktor-faktor syariah. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

KJKS dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan dikelola dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian KJKS juga menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijarah dan qardh. KJKS selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil dapat menjalankan kegiatan Maal dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ZISWAF).

Penilaian Tingkat Kesehatan

Penilaian terhadap tingkat kesehatan lembaga keuangan bank dan non bank telah diatur sedemikian rupa. Lembaga keuangan khususnya Bank Umum didalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga harus memperlihatkan tingkat kesehatan usahanya secara maksimal sehingga bank dapat bertahan dan terus berkembang ditengah persaingan yang begitu tajam. Maka sistem penilaian tingkat kesehatan bank mengikuti standar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2012 dan secara otomatis peraturan No. 6/10/PBI/2004 tidak berlaku kembali dimana pada peraturan ini penilaian kesehatan bank menggunakan metode CAMELS yang menggunakan penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan 6 faktor yaitu *Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

Pada pasal 3 Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, bank umum baik itu bank umum konvensional dan bank umum syariah wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Dimana penilaian sendiri dilakukan paling kurang setiap semester pada akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian secara individual dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) yang cakupan penilaiannya sesuai dengan faktor-faktor : profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) yang disingkat dengan nama RGEC.

Penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan ini mencoba diadopsi pada lembaga keuangan bukan bank yaitu koperasi khususnya koperasi jasa keuangan syariah wanita sehingga dapat diketahui tingkat kesehatan koperasi secara komprehensif sesuai dengan peraturan terbaru.

Risk-Based Bank Rating

Sesuai dengan peraturan BI no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*risk profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*). Penilaian terhadap factor-faktor profil risiko (*risk profile*) ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 44acto, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) merupakan penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, *sustainability earnings* dan manajemen rentabilitas.

Sumber: Esti Putri, Diah dan Eka Damayanthi (2013), Kusumawati (2014), Wahyudi dan Indrawati (2013), Furqan (2012)

Gambar 1. Pengembangan Model

Kemudian penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dari keempat faktor tersebut telah ditetapkan peringkat berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.

Kemudian peringkat komposit yaitu peringkat akhir hasil tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Kategori peringkat komposit terdiri dari : (1). Peringkat komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (2) Peringkat komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (3) Peringkat komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (4) Peringkat komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (5) Peringkat komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

METODE

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*). Data berupa laporan RAT dan laporan keuangan KJKS periode tahun 2012 – 2014. Populasi dari penelitian ini adalah KJKS wanita di Jawa Tengah. Sampel diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu, sehingga sesuai dengan penelitian yang dirancang maka sampel yang diperoleh sebanyak 5 KJKS Wanita di Kota Ungaran, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, dan Wonogiri.

Variabel yang digunakan yaitu risk profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital. Indikator dari masing-masing variable antara lain: (1) **Risk Profile**, proxy yang diambil antara lain : Risiko Kredit (*Non Performing Financing* (NPF), diperoleh dari perbandingan Pembiayaan (Kurang lancar, Diragukan, Macet) terhadap total pembiayaan)), Risiko Likuiditas (Rasio Asset likuid primer dan asset likuid sekunder terhadap pendanaan jangka pendek), Risiko Operasional (Karakteristik dan kompleksitas bisnis : skala usaha dan struktur organisasi; kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa; *corporate action* dan pengembangan bisnis baru, Sumber daya manusia : penerapan manajemen sumber daya manusia, kegagalan karena faktor manusia (human error), Teknologi Informasi : kompleksitas teknologi informasi; kegagalan sistem TI; keandalan infrastruktur pendukung, Fraud : fraud internal dan fraud eksternal), Risiko Hukum (faktor litigasi, 45faktor kelemahan perikatan, 45faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan). (2) **Good Corporate Governance** (GCG), indikator: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), *Independency*, Kewajaran (*Fairness*). (3) **Earnings**, proxy yang diambil adalah ROA (*Return on Assets*), perbandingan laba setelah pajak terhadap total aktiva. ROE (*Return on Equity*), perbandingan laba setelah pajak terhadap total ekuitas. REO (Rasio efektivitas Operasional), perbandingan Biaya operasional terhadap pendapatan operasional. (4) **Capital** proxy yang diambil adalah Kecukupan Pemenuhan Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : Menghitung tingkat kesehatan masing-masing koperasi menggunakan penilaian berdasarkan *risk based bank rating* atau RGEC. Analisis dilakukan dengan menghitung tingkat kesehatan sesuai dengan metode RGEC (*risk profile*, *Good corporate governance*, *earnings* dan *capital*). Dari keempat faktor tersebut telah ditetapkan peringkat berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Kemudian ditetapkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis tingkat kesehatan KJKS wanita menggunakan variable *risk profile*, GCG, *Earning* dan *Capital* Kemudian dilanjutkan dengan penilaian peringkat komposit dari KJKS Wanita di Jawa Tengah. Berikut penjelasan masing-masing variabel:

Risk Profile

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional koperasi. Risiko yang dinilai antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum.

Tabel 1. Hasil Penilaian Risiko Kredit, Risiko Likuiditas

Nama Koperasi	Tahun	Risiko Kredit (NPF)	Peringkat	Risiko Likuiditas	Peringkat
KJKS Wanita Mandiri Boyolali	2012	2.05	2	0.31	1
	2013	2.09	2	0.20	2
	2014	2.03	2	0.29	1
Kossuma Ibu Sejahtera Salatiga	2012	3.85	2	0.30	1
	2013	3.45	2	0.33	1
	2014	3.31	2	0.60	1
KJKS Ibu Mandiri Ungaran	2012	3.49	2	0.11	4
	2013	3.73	2	0.20	2
	2014	2.87	2	0.05	5
KJKS Kossuma Cita Sukoharjo	2012	3.93	2	0.18	3
	2013	3.40	2	0.38	1
	2014	3.26	2	0.68	1
KJKS Kossuma Salimah Wonogiri	2012	2.72	2	0.27	1
	2013	2.67	2	0.20	2
	2014	2.51	2	0.26	1

Sumber: Data diolah, kriteria rangking diambil dari www.bi.go.id

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki nilai NPF pada kisaran 2% s.d 5% berada pada peringkat 2, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga risiko kredit yang dimiliki KJKS Wanita di Jawa Tengah relatif lebih rendah.

Kemudian dari risiko likuiditas yang diperoleh dari perbandingan aset likuid (primer dan sekunder) dan pendanaan jangka pendek menunjukkan seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah kecuali KJKS Wanita Mandiri Ungaran memiliki peringkat yang fluktuatif dari tahun ke tahun antara peringkat 1 s.d 3 menunjukkan bahwa memiliki resiko likuiditas yang rendah karena mampu memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Sedangkan KJKS Wanita Mandiri Ungaran diantara KJKS yang lain memiliki peringkat yang semakin meningkat khususnya di tahun 2014 masuk peringkat 5 yang menunjukkan bahwa risiko likuiditas KJKS Ibu Mandiri memiliki risiko tinggi karena rendahnya kemampuan KJKS dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek.

Kemudian berdasarkan penilaian risiko operasional KJKS Wanita di Jawa Tengah (5 Lokasi) menunjukkan bahwa:

a) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis

KJKS Wanita baik KJKS Wanita mandiri Boyolali, Kossuma Ibu Sejahtera Salatiga, KJKS Ibu Mandiri Ungaran, KJKS Kossuma Cita Sukoharjo dan KJKS Kossuma Salimah Wonogiri memiliki skala usaha yang kecil, sedangkan struktur organisasi yang dimiliki hanya terdiri dari pengawas, pengurus dan pengelola. Kemudian pengelola hanya terdiri dari Manajer, Teller dan Marketing. Semua pengelola terdiri dari para wanita yang direkrut dengan pendidikan dari jenjang SMU s.d Sarjana. Bisnis KJKS ini tidak memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi karena hanya bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam berbasis syariah. Sedangkan produk yang ditawarkan antara lain simpanan wadiah, investasi mudharabah, investasi pendidikan, investasi hari raya, investasi qurban, investasi haji dan umroh, investasi ramadhan, investasi emas, murabahah, dan simpanan sukarela berjangka. Kemudian berkaitan dengan *corporate action* dan pengembangan bisnis, KJKS Wanita semakin gencar

memasarkan produk Koperasi yang berbasis syariah sehingga masyarakat tertarik dan bergabung dalam koperasi baik menjadi anggota aktif maupun anggota pasif. Selain itu diharapkan dana dapat terhimpun dari masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mendukung sektor mikro atau usaha kecil dan menengah. Dalam pengembangan bisnis KJKS senantiasa memperbaiki akad dari setiap transaksi pembiayaan sehingga tetap sesuai dengan konsep syariah. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu dan kualitas dari produk syariah yang ditawarkan

b) Sumber Daya Manusia

Seluruh KJKS Wanita memiliki jumlah SDM yang sedikit, rata-rata jumlah pengelola sekitar 2-4 orang dan hanya mengisi 3 jabatan yaitu sebagai manajer, *teller* dan *marketing*. Sehingga penerapan dan pengelolaan manajemen SDM tidak terlalu kompleks. Kemudian apakah terjadi kegagalan karena faktor manusia (*human error*), menunjukkan bahwa sebagian besar KJKS Wanita tidak terjadi kegagalan manusia atau *human error* kecuali pada KJKS Ibu Mandiri Ungaran, dimana pihak *marketing* melakukan kegiatan untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana yang telah dihimpun dari anggota koperasi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ini adalah pengawas dan pengurus menginstruksikan untuk segera mengganti dana anggota dan melaporkannya ke kepolisian. Kemudian merekrut karyawan baru yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.

c) Teknologi Informasi dan Infrastruktur pendukung

Teknologi Informasi yang dimiliki oleh seluruh KJKS Wanita mengalami peningkatan dengan adanya sistem berbasis online. Sistem ini mulai diaplikasikan dalam rangka mengatasi kelemahan sistem keuangan yang lama dikarenakan sistem keuangan yang lama dirasa masih terdapat kelemahan sehingga muncul peluang karyawan untuk melakukan *fraud* seperti kasus yang terjadi di KJKS Ibu Mandiri Ungaran. Diharapkan dengan adanya sistem keuangan berbasis online setiap data transaksi dapat terpantau dengan baik dan meminimalisir terjadinya *fraud* internal.

d) Fraud

Dari seluruh KJKS Wanita baik di Boyolali, Salatiga, Ungaran, Sukoharjo dan Wonogiri pernah mengalami *fraud* baik internal maupun eksternal. Khusus untuk KJKS Ibu Mandiri Ungaran *fraud* berasal dari internal, dimana pengelola yang bertugas divisi *marketing* menggunakan kelemahan sistem keuangan dengan memperkaya diri sendiri. Sedangkan KJKS Wanita yang lainnya lebih kepada *fraud* eksternal dimana pihak nasabah ketika mengajukan pembiayaan konsumtif berupa barang, maka pihak KJKS akan melakukan pembelian terhadap barang tersebut kepada agen toko yang telah ditunjuk namun terjadi *fraud* karena adanya kerjasama antara nasabah dan agen toko dimana agen toko mau menerima kembali barang yang telah dibeli dan mendapatkan *tip/fee* dari nasabah, sedang nasabah melakukan rekayasa bahwa nasabah membutuhkan barang tersebut padahal hanya membutuhkan dana dari KJKS semata. Sehingga tindakan yang dilakukan KJKS adalah dengan memblack list agen toko dan nasabah tersebut. Kemudian memperbaiki SOP dan melakukan pengawasan dari setiap akad pembiayaan yang dilakukan.

e) Kejadian Eksternal

Secara umum tidak ada kejadian eksternal baik itu dilihat dari frekuensi dan materialitas yang berdampak negatif terhadap kegiatan operasional koperasi.

Kemudian berdasarkan penilaian Risiko Hukum, dapat timbul akibat tuntutan hukum dan/atau aspek kelemahan yuridis. Risiko ini juga timbul akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dari aspek ini, Undang-undang koperasi pernah mengalami perubahan menjadi UU koperasi yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2012, namun UU tersebut tidak berlaku atau sudah tidak diterapkan dan beralih kembali ke UU yang lama yaitu UU No. 25 Tahun 1992 sehingga KJKS mengikuti terhadap setiap perubahan UU yang ada dan mengikuti pedoman pengelolaan Koperasi secara baik dan benar. Kemudian untuk menghindari risiko hukum, KJKS sentiasa mengikuti SOP yang telah ditentukan dari setiap akad yang dilakukan dengan memperhatikan syarat sah kontrak dan agunan yang memadai.

Good Corporate Governance (GCG)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menerbitkan peraturan No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, namun dalam penelitian ini, penilaian GCG mencoba mengadopsi peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Ada 5 elemen yang dinilai yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Dari keseluruhan KJKS Wanita menunjukkan bahwa:

a) Aspek Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pada KJKS Wanita di Jawa Tengah segala keputusan dan informasi disampaikan dengan transparan dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan system akuntansi yang bermigrasi dari offline menjadi online kemudian pelaporan laporan keuangan tahunan dan laporan RAT yang telah disusun disampaikan kepada seluruh anggota koperasi. Laporan keuangan disajikan dengan lengkap dan didokumentasikan setiap proses penyusunan laporan keuangan

b) Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana dengan efektif. Pada KJKS Wanita di Jawa Tengah Indikator penerapan akuntabilitas koperasi dapat dilihat dari ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi, kelengkapan legalitas perijinan kegiatan usaha koperasi, ketertiban penyelenggaraan organisasi, kompetensi pengurus pengawas dan pengelola koperasi yang sesuai, anggota berpartisipasi dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, peningkatan jumlah anggota, ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan, dokumentasi laporan kegiatan pelayanan, ketersediaan system informasi.

c) Aspek Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada KJKS Wanita di Jawa Tengah, aspek tanggung jawab dapat dilihat dari ketaatan pelaksanaan RAT sesuai perundang-undangan, kemudian pengelolaan koperasi dilakukan secara professional antara pengawas, pengurus dan pengelola sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan baik yang tercermin dalam laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

d) Aspek Independensi

Independensi merupakan pengelolaan perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip koperasi yang sehat. Pada KJKS Wanita di Jawa Tengah, independensi pengawas, pengurus dan pengelola bekerja secara professional tanpa mengutamakan kepentingan pihak tertentu.

e) Aspek kewajaran

Kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Pada KJKS Wanita di Jawa Tengah, kewajaran tercermin dari Pengelolaan keuangan dilihat dari pengelolaan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas serta aktivitas pelayanan dan kinerja operasional yang dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memenuhi keinginan para stakeholder KJKS yaitu anggota koperasi dengan menunjukkan kinerja koperasi yang baik dan wajar dan tidak ada penyimpangan, kecuali pada kasus KJKS Ibu Mandiri Ungaran yang telah diketahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan Marketing dan kasus tersebut telah diatasi dengan baik.

Parameter GCG diatas menunjukkan bahwa KJKS Wanita di Jawa Tengah telah melaksanakan GCG dengan cukup baik.

Earning

Penilaian *earning* atau rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan Koperasi untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian ROA, ROE dan REO KJKS Wanita di Jawa Tengah

Nama Koperasi	Tahun	ROA	Peringkat	ROE	Peringkat	REO	Peringkat
KJKS Wanita Mandiri Boyolali	2012	0.84	3	10.27	1	93.92	5
	2013	3.09	1	40.71	1	84.47	2
	2014	2.93	1	28.71	1	85.67	3
Kossuma Ibu Sejahtera Salatiga	2012	2.65	1	14.70	1	68.91	1
	2013	3.01	1	8.78	1	85.38	3
	2014	2.26	1	7.37	1	90.38	5
KJKS Ibu Mandiri Ungaran	2012	4.96	1	22.90	1	76.40	1
	2013	6.25	1	27.70	1	73.15	1
	2014	3.04	1	17.37	1	80.31	1
KJKS Kossuma Cita Sukoharjo	2012	4.07	1	14.69	1	195.62	5
	2013	3.48	1	19.17	1	84.44	2
	2014	2.97	1	20.69	1	89.03	4
KJKS Kossuma Salimah Wonogiri	2012	2.62	1	19.10	1	83.82	2
	2013	2.04	1	7.58	1	88.10	4
	2014	1.75	1	7.80	1	90.25	5

Sumber: Data diolah, kriteria ranking diambil dari www.bi.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai ROA seluruh KJKS Wanita diatas 1,5% masuk peringkat 1 kecuali KJKS Wanita Boyolali tahun 2012 hanya masuk peringkat 3 namun pada periode berikutnya masuk peringkat 1. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi KJKS Wanita di Jawa Tengah dalam keadaan sehat karena memiliki kemampuan dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Kemudian berdasarkan rasio ROE yang dihasilkan oleh KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki nilai ROE yang berfluktuasi. Namun berdasarkan penilaian peringkat menunjukkan bahwa seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki peringkat yang baik yaitu peringkat 1 karena modal yang disetor mampu menghasilkan laba bagi koperasi.

Sedangkan rasio REO (rasio efektivitas operasional) mengukur efisiensi kegiatan operasional koperasi. Rasio ini diperoleh dari perhitungan Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional. Menunjukkan bahwa sebagian besar KJKS belum efisien dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Hanya KJKS Wanita Mandiri Ungaran saja yang memiliki peringkat 1 dimana pengelola mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien.

Capital

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dengan menggunakan *proxy* KPMM (kewajiban penyediaan modal minimum), tujuan dari variable KPMM ini adalah untuk mengukur kecukupan modal KJKS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. KPMM diperoleh dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap dikurangi penyertaan kemudian dibagi dengan ATMR.

Tabel 3. Penilaian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM atau CAR)

Nama Koperasi	Tahun	KPMM	Peringkat
KJKS Wanita Mandiri Boyolali	2012	14.20	1
	2013	8.82	3
	2014	9.04	2
Kossuma Ibu Sejahtera Salatiga	2012	18.18	1
	2013	34.25	1
	2014	35.97	1
KJKS Ibu Mandiri Ungaran	2012	19.16	1
	2013	18.45	1
	2014	17.71	1
Kossuma Cita Sukoharjo	2012	32.07	1
	2013	26.56	1
	2014	25.10	1
Kossuma Salimah Wonogiri	2012	12.32	1
	2013	15.85	1
	2014	26.97	1

Sumber: data Diolah, kriteria ranking diambil dari www.bi.go.id

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar KJKS Wanita di Jawa Tengah memberikan nilai KPMM atau CAR diatas 12% walaupun KJKS Wanita Mandiri Boyolali tahun ke 2013 dan 2014 mengalami penurunan CAR dan masuk peringkat 3 dan 2. Namun memberikan nilai CAR di atas 8%, sehingga dari data tersebut menunjukkan seluruh KJKS Wanita mampu memenuhi kewajiban dalam menyediakan modal minimum.

Hasil Peringkat Komposit

Berdasarkan kodifikasi peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank tahun 2012 yang mana diadopsi pada penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah, maka penilaian dilakukan dengan memperhatikan matriks penilaian profil risiko, penilaian peringkat GCG, Penilaian peringkat rentabilitas dan penilaian peringkat permodalan, kemudian dapat diberikan penilaian peringkat komposit masing-masing KJKS Wanita di Jawa Tengah.

Tabel 4. Hasil Peringkat Komposit KJKS Wanita di Jawa Tengah

Nama KJKS	2012				2013				2014				PK
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
KJKS Wanita Mandiri Boyolali	2	3	3	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3
KJKS Ibu Sejahtera Salatiga	2	3	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	3
KJKS Ibu Mandiri Ungaran	3	3	1	1	2	3	1	1	4	3	1	1	3
Kossuma Cita Sukoharjo	3	3	3	1	2	3	2	1	2	3	3	1	3
Kossuma Salimah Wonogiri	3	3	3	1	2	3	2	1	2	3	3	1	3

Sumber: Data diolah, kriteria ranking diambil dari www.bi.go.id

Keterangan: Rangking A (*Risk Profile*), Rangking B (*Good Corporate Governance*), Rangking C (*Earning*), Rangking D (*Capital*), PK (Peringkat Komposit).

Berdasarkan hasil perhitungan peringkat komposit diatas ada beberapa indikator yang tidak dimasukkan dalam penilaian risiko profil yaitu risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko strategik dan risiko reputasi dikarenakan data yang tidak memadai untuk dilakukana analisis. Kemudian hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah memberikan peringkat PK-3 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian,

antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Walaupun masing-masing KJKS memiliki kemampuan yang sangat memadai pada aspek rentabilitas, GCG, dan permodalan. Namun pada aspek profil risiko masih diperlukan manajemen risiko yang baik sehingga risiko yang dihadapi oleh masing-masing KJKS dapat diminimalisir, selain itu aspek efisiensi biaya yang dilihat dari proxy REO seluruh KJKS Wanita memiliki peringkat yang rendah menunjukkan kemampuan mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional masih belum efisien, walaupun REO rendah kemampuan rentabilitas KJKS dirasa masih sangat baik karena menghasilkan laba yang sangat baik bagi koperasi yang tercermin dari ROA dan ROE.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing faktor dalam penilaian tingkat kesehatan *risk-based bank* yang diterapkan dalam koperasi maka faktor *risk profile* seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki NPF kisaran 2% s.d 5% yang masuk peringkat 2. Menunjukkan kemampuan mengelola risiko yang cukup baik terhadap kegagalan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan faktor *Good Corporate Governance* seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki peringkat 3 yang menunjukkan manajemen KJKS Wanita telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank

Berdasarkan faktor *Earning*, KJKS Wanita di Jawa Tengah masuk peringkat 3 yang menunjukkan rentabilitas cukup memadai, laba melebihi target namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan modal bank. Hal ini tercermin dari kinerja ROA dan ROE yang baik walaupun pada proxy REO belum efisien.

Berdasarkan faktor *Capital*, KJKS Wanita di Jawa Tengah memiliki peringkat 1 yang menunjukkan KJKS Wanita memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. Hal ini tercermin dari nilai KPMM (CAR) seluruh KJKS Wanita diatas 12% kecuali KJKS Wanita Boyolali yang memiliki KPMM (CAR) diatas 8%.

Setelah mengetahui peringkat masing-masing faktor baik *risk profile*, GCG, *earning* dan *capital*, maka diperoleh hasil peringkat komposit seluruh KJKS Wanita di Jawa Tengah pada peringkat PK-3 yang mencerminkan kondisi KJKS yang secara umum **cukup sehat** sehingga dinilai **cukup mampu** menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut **cukup signifikan** dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha KJKS. Oleh karena itu implikasi dalam penelitian ini bahwa penerapan penilaian tingkat kesehatan perbankan menggunakan *risk-based bank* dapat diimplementasikan dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi dengan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Risiko, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*, walaupun perlu diuji lebih lanjut mengenai beberapa proxy dari masing-masing variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dalam menilai tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan syariah.

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dari penelitian ini yaitu : (1). Perlu adanya integrasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dibawah pengelolaan Otoritas Jasa Keuangan sehingga komponen penilaian kesehatan perbankan yang sudah ada bisa diadopsi untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan KJKS. (2). Komponen penilaian tingkat kesehatan untuk KJKS dapat disesuaikan dengan skala bisnis dari KJKS dan dibedakan dengan perbankan karena beberapa penilaian indikator seperti *risk profile* dan GCG yang tidak dapat diaplikasikan di KJKS. (3). Penelitian kedepan dapat mengakomodir seluruh indikator dari faktor *risk profile* baik risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko strategik dan risiko reputasi sehingga dapat memberikan hasil yang komprehensif dan analisis risiko yang mendalam.

REFERENSI

- Bank Indonesia. 2004. *PBI Nomor 6/10/PBI/2004* Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id, diakses tanggal 2 Februari 2015).
- Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id, diakses tanggal 2 Februari 2015).
- Bank Indonesia. 2011. *PBI Nomor 13/1/PBI/2011* Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id, diakses tanggal 2 Februari 2015).
- Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Nomor 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id, diakses tanggal 2 Februari 2015).
- Furqan, S. (2012). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Non Devisa Dengan Menggunakan Metode REC (Risiko, Earning dan Capital). *Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika..*
- Ghozali, I. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, M. (2014). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PERBANKAN BERDASARKAN METODE CAMELS DAN RGEC PADA PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 2012
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Putri, I. D. A. D. E., & Damayanthi, I. G. A. E. (2013). Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan RGEC pada perusahaan Perbankan besar dan kecil. *E-Jurnal Akuntansi*, 483-496.
- Rivai, V., & Alma, B. (2012). *Islamic Banking and Finance, Dari Teori ke Praktik.*
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking : sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global : sebuah teori, konsep, dan aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara.*
- Sudarma, I. W., & Yasa, I. M. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.*
- Suryawardana, Edy. *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Binna Ummat Sejahtera Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)*
- Wahyudi, J., & Indrawati, S. (2013). Perbedaan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC Sebelum dan Sesudah Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. www.depkip.co.id